

RETORIKA SOEKARNO DALAM KOMUNIKASI INTERNASIONAL ANTI IMPERIALISME DAN KAPITALISME

Soekarno's Rhetoric in Anti-Imperialism and Anti-Capitalism International Communication

Franky P. Roring

FISIP, Universitas Bung Karno

Abstract: *This study examines Soekarno's rhetoric in international communication, particularly his consistent opposition to imperialism and capitalism. Invitational rhetoric explains how Soekarno opened space for audiences to understand an alternative perspective on colonial domination and international solidarity. His speeches and political actions helped build awareness and solidarity among colonized countries, including cooperation between Asian and African nations. The analysis also considers ethos, pathos, and logos as persuasive elements in Soekarno's international rhetoric.*

Keywords: Soekarno's Rhetoric; International Communication; Imperialism; Capitalism; Diplomacy

Abstrak: Penelitian ini mengkaji retorika Soekarno dalam komunikasi internasional, khususnya konsistensinya menentang imperialisme dan kapitalisme. Teori retorika ajakan digunakan untuk menjelaskan cara Soekarno membuka ruang bagi audiens dalam memahami perspektif alternatif mengenai dominasi kolonial dan solidaritas internasional. Pidato dan tindakan politiknya berperan dalam membangun kesadaran serta solidaritas negara-negara terjajah, termasuk kerja sama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Analisis juga memperhatikan ethos, pathos, dan logos sebagai unsur persuasif dalam retorika internasional Soekarno.

Kata Kunci: Retorika Soekarno; Komunikasi Internasional; Imperialisme; Kapitalisme; Diplomasi

1. Pendahuluan

Soekarno merupakan pemikir sekaligus pemimpin pergerakan yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Leifer, dalam Indonesia's Foreign Policy, menilai pemikiran politik luar negerinya melampaui konteks zamannya. Peran Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika menunjukkan kemampuannya menggalang solidaritas negara-negara yang pernah mengalami penjajahan dan membangun kekuatan bersama di luar dominasi negara maju.

Sejak muda hingga menjadi kepala negara, Soekarno konsisten menggunakan retorika untuk membangun kesadaran anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Ia memandang bangsa Indonesia dan negara-negara terjajah tidak hanya berhadapan dengan satu negara penjajah, tetapi dengan sistem imperialisme dan kapitalisme internasional. Karena itu, ia mendorong pembentukan kesadaran, solidaritas, dan kekuatan bersama di antara bangsa-bangsa terjajah.

Soekarno melihat nasionalisme, Marxisme, dan Islam sebagai kekuatan politik yang dapat menghadapi imperialisme dan kapitalisme internasional. Melalui Konferensi Islam Asia-Afrika, ia menggunakan pidato untuk membangkitkan kesadaran dan persatuan dalam menghadapi negara-negara imperialis-kapitalis.

Pemikiran tersebut dikembangkan dalam pidato To Build the World Anew pada Sidang Umum PBB 1960. Soekarno menawarkan pembentukan tata dunia yang lebih adil dan mengusulkan Pancasila sebagai salah satu landasan bagi Piagam PBB.

Dalam komunikasi internasional, Soekarno menjalankan diplomasi tingkat tinggi (summit diplomacy), dengan kepala negara berperan langsung dalam proses diplomasi. Ia tidak hanya membawa pesan Indonesia, tetapi juga menjadi representasi pesan tersebut di hadapan masyarakat internasional.

Kemampuan Soekarno menggalang opini publik internasional tampak dari respons para pemimpin dunia terhadap retorika dan sikap politiknya. Kehadirannya di luar negeri juga memperoleh perhatian luas dari media massa internasional. Sehingga di manapun berada terutama di luar negeri menjadi sorotan media massa internasional.

Dalam kehidupan politik, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan memobilisasi opini publik melalui kegiatan komunikasi (Effendy, 2000:159).

Soekarno kemudian tampil sebagai komunikator yang berpengaruh dan mewakili aspirasi negara-negara Asia-Afrika. Kredibilitas, kemampuan retorika, dan kesesuaian pesannya dengan pengalaman bangsa-bangsa terjajah membantunya membangun pemahaman serta solidaritas bersama.

Pesan anti-imperialisme dan anti-kapitalisme disampaikan melalui saluran domestik, forum internasional, dan media massa internasional. Melalui retorika ajakan, Soekarno menyerukan persatuan negara-negara terjajah dalam menghadapi sistem dunia yang dinilainya tidak adil.

2. Kajian Literatur

2.1 Retorika Ajakan

Penelitian ini menggunakan teori retorika ajakan yang dikembangkan Sonja K. Foss dan Cindy L. Griffin dalam *Beyond Persuasion*. Teori kritis ini membahas bentuk interaksi yang tidak bertujuan memaksakan perubahan, melainkan membuka ruang bagi pihak lain untuk memahami perspektif yang berbeda (Littlejohn dan Foss, 2011:262-265).

Retorika ajakan menggunakan gagasan undangan, baik secara harfiah maupun metaforis, sebagai dasar percakapan. Ketika komunikator mengundang orang lain untuk mengenali perspektifnya, pendengar memperoleh kesempatan melihat dunia dari sudut pandang pembicara. Penerimaan tetap bergantung pada masing-masing pendengar, sedangkan tujuan utamanya adalah membangun pengertian terhadap perspektif yang berbeda (Littlejohn dan Foss, 2011:265).

Retorika ajakan menjalankan asumsi ketika kita membuka diri kita sendiri terhadap ide-ide dengan bebas yang berbeda dari diri kita, kita memiliki banyak kesempatan untuk memahami (Little John dan Karen, 2011:266). Sonja Foss dan Karen Foss menganjurkan bahwa langkah pertama yang penting dalam menggerakkan sebuah mode ajakan adalah dengan menciptakan lingkungan yang tepat dengan menciptakan dan menegakkan asumsi retorika ajakan. Sebuah lingkungan kondusif untuk semua pihak dalam memperoleh pemahaman lebih kuat yang terdiri atas empat faktor: kebebasan, keamanan, nilai dan keterbukaan (Little John dan Karen, 2011:267). Keempat faktor tersebut mempengaruhi komunikasi internasional.

2.2 Komunikasi Internasional

Menurut Phil Astrid Soesanto yang diambil dari pendapat Heinz-Dietrich Fisher, komunikasi internasional adalah the communication process different countries or nations across frontiers. Menurut Santoso Sastropetro, komunikasi internasional adalah mempelajari pernyataan antar –negara/pemerintah/bangsa yang bersifat umum melalui lambang-lambang yang berarti (Suryanto, 2015:565).

Menurut Gerhard Maletzke dalam Buku F. Rachmadi (1988: 37), komunikasi internasional merupakan proses komunikasi antar – bangsa yang secara fisik dipisahkan oleh batas-batas teritorial negara. Komunikasi internasional adalah komunikasi antar-bangsa dan negara. Komunikasi ini berwujud diplomasi dan propaganda, dan seringkali berhubungan dengan situasi intercultural dan interracial (1988:37).

Dalam bukunya Shoelhi (2011:2), disebut komunikasi internasional karena pesan-pesannya terkait dengan kepentingan antarbangsa dan disampaikan melalui saluran konferensi tingkat tinggi atau sejenisnya dan media massa yang melintasi batas negara. Ditilik secara paradigmaatis, bidang studi komunikasi internasional ditentukan sekurangnya oleh 3 unsur, yaitu komunikator-komunikan yang terdiri dari bangsa yang berbeda, pesan yang disampaikan berkaitan dengan masalah – masalah internasional, dan saluran yang digunakan adalah saluran internasional.

Deddy Djamaluddin dalam buku Shoelhi (2011: 3), menjelaskan bahwa komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan luas.

Komunikasi internasional lebih banyak menekankan kajian atas realitas politik dengan fokus perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain sebagai realitas politik yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain; dan lebih khusus lagi kajian strategi komunikasi internasional (2011:4). Ditinjau dari aspek paradigma komunikasi, pendekatan terhadap komunikasi internasional yang digunakan bersifat makro, dengan aktor-aktor non – individual sebagai unit analisis, dan bersinggungan erat dengan wilayah disiplin ilmu hubungan internasional atau ekonomi politik internasional (2013:5).

Dalam perkembangannya, ditinjau dari sudut aplikasi, disiplin komunikasi internasional kerap dipraktikkan dengan menggunakan empat pendekatan dominan, yaitu pendekatan idealistis-humanistik, kepengikutan politik baru (political proselytization), serta informasi sebagai kekuatan ekonomi dan kekuatan politik (2013:5).

Menurut Suryanto (2015:565), komunikasi internasional menggunakan tiga sarana berikut:

1. Diplomasi
2. Negosiasi
3. Lobi

Tiga kriteria yang membedakan komunikasi internasional dari bentuk komunikasi lainnya adalah sebagai berikut (Suryanto, 2015:571):

1. Jenis isu, pesannya bersifat global
2. Komunikator dan komunikannya berbeda kebangsaan
3. Saluran media yang digunakan bersifat internasional.

Suryanto (2015:577) mengidentifikasi dua saluran komunikasi internasional:

1. Media massa, seperti pers, radio, televisi, dan film.
2. Fasilitas-fasilitas internasional lain, seperti organization channel, international traveler, dan cultural events.

2.3 Retorika, Komunikasi Politik Internasional, dan Diplomasi

Komunikasi politik internasional mengacu pada komunikasi yang digunakan suatu negara untuk memengaruhi perilaku politik yang relevan di negara lain. Cakupannya meliputi propaganda, kegiatan informasi pemerintah, serta aspek tertentu dari komunikasi diplomatik. Adapun kegiatan pers, pendidikan internasional, dan misi keagamaan tidak termasuk apabila tujuan utamanya bukan memengaruhi perilaku politik.

Dalam konteks tersebut, komunikasi dipahami sebagai pemindahan makna melalui simbol tertulis, lisan, gambar, atau tindakan. Istilah komunikasi politik internasional merangkum kegiatan seperti negosiasi, propaganda, perang politik, dan perang psikologis yang bertujuan memengaruhi perilaku penduduk atau bangsa lain yang relevan dengan kepentingan politik negara komunikator.

Tujuan tersebut membutuhkan retorika. Effendy (2004:53) menjelaskan bahwa istilah retorika berasal dari bahasa Latin *rhetorica* yang berarti ilmu berbicara. Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren dalam *Modern Rhetoric* mendefinisikan retorika sebagai *the art of using language effectively* atau seni menggunakan bahasa secara efektif.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa retorika dapat dipahami secara sempit sebagai seni berbicara dan secara luas sebagai penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Karena itu, retorika tidak hanya berkaitan dengan publik speaking atau pidato di depan umum, tetapi juga mencakup seni menulis.

Memang, dalam politik rasanya sukar bagi seorang politikus untuk mencapai reputasi, prestasi, dan prestise tanpa penguasaan retorika. Bagaimana dia menyebarluaskan idenya kepada rakyat dan menanamkan idenya pada benak individu tanpa retorika (2014:60).

Anderson memandang retorika sebagai proses dua arah yang bersifat deliberatif:

In rhetoric – when it is defined as a potentially deliberative two-way process –relevant and sincere argumentation will play a Central role.

Participants may expect that principles of relevance and veracity will be respected (Jan Anderson, 1973:33). (retorika didefinisikan sebagai proses dua arah yang berpotensi deliberatif argumentasi yang relevan dan tulus akan memainkan peran sentral. Mereka yang terlibat berharap bahwa prinsip relevansi dan kebenaran akan dihargai).

Pandangan senada dari Knut, yaitu:

Rhetoric represents an opportunity for deliberation, and a common understanding of phenomenon is often sought. In what constitutes a genuine discussion, all participants must be willing to adjust their line of action, if convincing counterarguments to their initial position are presented (Knut, 1973:98). (Retorika merupakan kesempatan untuk mempertimbangkan, dan pemahaman bersama terhadap fenomena. Dalam diskusi yang sesungguhnya, semua peserta harus bersedia untuk menyesuaikan garis tindakan mereka, jika meyakinkan argumen balik terhadap posisi awal mereka disajikan) Sebagai kegiatan yang memakai bahasa sebagai sarana dasar dapat digolongkan dalam kegiatan berbicara. Retorika dapat dibatasi sebagai teori dan praktik kemahiran berbahasa, baik lisan, maupun tulisan. Retorika memiliki peranan cukup penting dalam masyarakat (Suryanto: 461). Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara adalah suatu kemampuan khusus pada manusia bahasa dan pembicaraan muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pemikirannya kepada manusia lain (Suryanto: 467 468).

Doris menekankan pentingnya retorika pemimpin sebagai bidang kajian:

Leaders rhetoric used to be a fairly active research area but its popularity has been declining in recent decades. It deserves revival. Leaders' discourse is a powerful political stimulus –it is broadly disseminated, and elite and mass audienss pay attention to it because leaders can implement their proposals (Doris, 2005:597).

Retorika pemimpin pernah menjadi bidang penelitian yang aktif, tetapi popularitasnya menurun dalam beberapa dekade terakhir dan layak dihidupkan kembali. Wacana pemimpin merupakan stimulus politik yang kuat karena disebarkan secara luas serta diperhatikan oleh khalayak elite dan massa; pemimpin memiliki kewenangan untuk melaksanakan gagasan yang mereka sampaikan.

Dalam pengantar bukunya, Jalaluddin Rakhmat menyatakan bahwa retorika dapat membebaskan seseorang dari posisi yang dikuasai menjadi pihak yang memiliki kendali.

Dengan senjata, penguasa dapat menguasai tanah dan negara; dengan retorika, pemimpin dapat menaklukkan hati dan jiwa (Rakhmat, 2001:v).

Rakhmat juga mengutip tulisan Y. B. Mangunwijaya berjudul Pendidikan Manusia Merdeka yang dimuat dalam Kompas, 11 Agustus 1992:

Banyak orang keliru menganggap kemajuan dunia Barat hanya bertumpu pada matematika, fisika, atau kimia. Jika ditelaah lebih dalam, kemajuan ilmu alam tersebut lebih dahulu ditopang oleh tradisi panjang pendidikan bahasa.

Tradisi itu berakar pada filsafat Yunani yang bertumpu pada retorika (Rakhmat, 2001:v).

Retorika turut menentukan proses diplomasi. Mengacu pada Quincy Wright, Roy menjelaskan bahwa diplomasi yang berhasil menempatkan penekanan secara tepat pada satu atau lebih instrumen diplomasi sesuai keadaan. Diplomasi dinilai berhasil ketika para pihak mencapai saling pengertian. Kompromi yang memuaskan seluruh pihak merupakan hasil yang sangat baik; namun ketika hal itu tidak tercapai, diplomasi tetap dapat dianggap berhasil apabila para pihak bersedia tunduk pada hasil kompromi (Roy, 1991:19).

Menurut Charles A. McClelland (1986:177), konflik dalam hubungan internasional dapat diredakan melalui penyampaian informasi yang efektif dan peningkatan kontak antarpihak. McClelland juga memandang diplomasi sebagai kegiatan komunikasi, sebagaimana kegiatan militer dan intelijen (1986:186). Secara umum, diplomasi dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi antarpelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara (Darmansjah, 2004:xxi).

Hakikat diplomasi masa kini tetap serupa dengan diplomasi pada masa lalu. Perbedaannya, diplomasi tidak lagi hanya menjadi urusan diplomat karier dan kementerian luar negeri. Diplomasi juga dapat dilakukan oleh pejabat kementerian lain, kepala negara melalui diplomasi tingkat tinggi (*summit diplomacy*), maupun utusan khusus (*special envoy*) (Teuku, 1993:58).

Effendy (2000:159) membedakan efek komunikasi menjadi efek kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif terjadi ketika pesan menghasilkan pemahaman atau pengetahuan. Efek afektif muncul ketika pesan juga membangkitkan perasaan tertentu. Adapun efek behavioral tercapai ketika pesan tidak hanya dipahami dan dirasakan, tetapi juga mendorong komunikasi melakukan tindakan.

Ernest Satow, sebagaimana dikutip Teuku May Rudy (1993:57), memandang diplomasi sebagai penggunaan kecerdasan dan kelincahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan hubungan resmi antarnegara berdaulat.

Mengacu pada *Encyclopedia Britannica*, Rumintang (2008:5) menjelaskan bahwa diplomasi berkaitan dengan metode, bukan objek perundingan. Diplomasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan.

Sebagai kegiatan komunikasi, diplomasi menuntut kemampuan verbal dan nonverbal. Panikkar, sebagaimana dikutip Roy (1991:3), mendefinisikan diplomasi dalam politik internasional sebagai seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komunikasi nonverbal dapat berbentuk bahasa tubuh, tanda, tindakan, atau objek. Diplomasi biasanya dimulai melalui tawar-menawar dan komunikasi langsung maupun tidak langsung untuk mencapai persetujuan mengenai suatu isu.

Menurut Alvin Z. Rubenstein, pengaruh merupakan hasil yang muncul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu. Karena itu, hubungan antara sumber dan hasil harus memiliki relevansi yang kuat dan jelas. Persepsi merupakan pola pikir atau anggapan terhadap masalah yang dihadapi, termasuk hasil analisis mengenai niat dan maksud pihak atau negara lain (May, 1993:26).

Dalam diplomasi, penilaian apakah kapabilitas suatu negara lebih unggul atau lebih rendah bergantung pada cara negara tersebut mempersepsikan dirinya dan pihak lain. Mengacu pada pandangan Hans Morgenthau, politik luar negeri tidak dirumuskan oleh seluruh warga negara, melainkan oleh individu-individu yang menyusun, melaksanakan, atau mewakili kebijakan tersebut di panggung internasional.

Individu-individu sebagaimana dikemukakan Morgenthau merupakan elit-elit politik yang berkuasa yang merumuskan kepentingan nasional dan yang mempersepsikan pihak lain atau negara lain dalam dunia internasional. Dengan demikian semakin tinggi persepsi suatu negara terhadap pihak atau negara lain maka semakin besar pengaruh pihak atau negara lain terhadap negara tersebut, sebaliknya semakin kecil persepsi suatu persepsi maka semakin kecil pengaruh.

Rudy (1993:66), dengan merujuk Lovell (1970:99), menjelaskan bahwa perkiraan pembuat kebijakan terhadap strategi negara lain dan kapabilitas relatif negaranya sendiri menentukan gaya interaksi yang dipilih.

Keberhasilan diplomasi atau perundingan sebagai instrumen politik luar negeri pada akhirnya ditentukan oleh para pelakunya. Kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, daya tahan fisik dan mental, serta motivasi diplomat atau perunding memengaruhi hasil yang dapat dicapai. Dalam kerangka Machiavelli, selain *virtu* atau kecakapan dan keutamaan serta *necessita* atau keharusan yang sah, *fortuna* juga memengaruhi hasil akhir. *Fortuna* bukan sekadar nasib baik, melainkan perpaduan situasi yang kondusif bagi pengambilan keputusan (Budiono, 1987:61).

Dengan demikian, strategi pencapaian kepentingan nasional dalam politik luar negeri diwujudkan melalui strategi atau gaya diplomasi. Soenarko menjelaskan bahwa gaya *low profile*, *high profile*, defensif, ofensif, reaktif, dan proaktif merupakan pilihan yang digunakan diplomat sesuai kepentingan serta perkembangan situasi, bukan patokan yang bersifat baku (Soesiswo, 1996:108).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa menarik generalisasi yang lebih luas (Sugiyono, 2009). Dalam kajian komunikasi internasional ini digunakan pendekatan idealistis-humanistik, yang memandang komunikasi internasional sebagai sarana untuk mempererat persahabatan dan kerja sama, menyelesaikan persoalan antarmanusia dan antarbangsa, serta

meningkatkan kesejahteraan bersama. Meskipun demikian, pergaulan internasional tetap dapat mengalami gesekan akibat perbedaan kepentingan (Shoelhi, 2013:5).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003:27)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Jejak Pemikiran Internasional Soekarno

Jejak pemikiran internasional Soekarno mengenai pembentukan kekuatan bersama untuk melawan imperialisme dan penjajahan telah terlihat dalam tulisannya di Fikiran Rakyat pada 1933. Soekarno menyerukan pembentukan *eenheidsfront* atau persatuan perjuangan bangsa-bangsa Asia bersama seluruh kekuatan yang menentang kapitalisme dan imperialisme internasional. Gagasan tersebut menjadi dasar penggalangan solidaritas bangsa-bangsa terjajah dan kemudian diwujudkan melalui Konferensi Asia-Afrika yang dihadiri 29 negara, termasuk enam negara dari Afrika.

“Jikalau raksasa-raksasa imperialisme bekerja bersama-sama, marilah kita juga mengadakan eenheidsfront (persatuan perjuangan) daripada prajurit-prajurit kemerdekaan Asia. [...] Jikalau banteng Indonesia bisa bekerja bersama-sama dengan semua musuh kapitalisme dan imperialisme internasional di seluruh dunia, tentu hari-harinya imperialisme internasional itu segera terbelah.”

Dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno mengemukakan hubungan antara kemanusiaan, nasionalisme, dan internasionalisme. Menurutnya, Indonesia tidak hanya harus menjadi negara merdeka, tetapi juga berkontribusi pada persatuan dan persaudaraan dunia. Internasionalisme tidak dapat tumbuh tanpa berakar pada nasionalisme, sedangkan nasionalisme tidak dapat berkembang tanpa hidup dalam lingkungan internasionalisme.

Bagi Soekarno, nasionalisme dan internasionalisme memiliki hubungan timbal balik. Dalam perspektif retorika ajakan, pidato tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda tanpa memaksakan perubahan kepada audiens. Soekarno berupaya membongkar anggapan bahwa dominasi bangsa kulit putih melalui imperialisme dan kapitalisme merupakan keadaan yang alamiah, sekaligus menunjukkan bahwa nasionalisme dan internasionalisme dapat ditempatkan secara harmonis.

Soekarno tampil sebagai salah satu juru bicara utama negara-negara nonblok. Ia tidak hanya membawa pesan, tetapi juga merepresentasikan pesan tersebut melalui sikap politiknya. Dalam amanat pada Kursus Kader Nasakom, Soekarno menolak hidup berdampingan secara damai dengan imperialisme dan menegaskan pengaruh Indonesia terhadap rakyat Asia, Afrika, Amerika Latin, serta kawasan lainnya. Pidato politik seperti itu berperan dalam menggugah sentimen dan pemikiran mengenai identitas (Williams, 2009:6).

“Indonesia-lah yang pertama-tama berani menyangkal slogan yang sudah berpuluh-puluh tahun didengung-dengungkan di dunia ini, yaitu peaceful coexistence. Indonesia dengan tidak tedeng aling-aling berkata: tidak, tidak bisa peaceful coexistence dengan imperialis.”

Dalam pidato di Sidang Umum PBB XV pada 30 September 1960, Soekarno tampil sebagai pemimpin negara yang baru merdeka dengan mengusulkan pembaruan PBB agar lebih adil. Ia menawarkan Pancasila sebagai landasan yang dapat memperkuat Piagam PBB, menyesuaikan organisasi tersebut dengan perkembangan dunia, dan meningkatkan penerimaan seluruh negara anggota.

“Marilah kita pertimbangkan apakah lima sila yang telah saya kemukakan dapat memperkuat dan memperbaiki piagam kita. Saya yakin bahwa diterimanya kelima prinsip itu dan dicantulkannya dalam piagam akan sangat memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa serta membuat piagam lebih dapat diterima oleh semua anggota, baik yang lama maupun yang baru.”

Jauh sebelum tuntutan reformasi PBB menguat, Soekarno telah mengusulkan landasan kelembagaan yang lebih adil dan damai. Pidatonya tidak hanya menyampaikan usulan mengenai Pancasila, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara baru dapat tampil setara dalam forum internasional. Dalam konteks ini, Soekarno tidak hanya menyampaikan pesan; dirinya turut menjadi representasi pesan tersebut.

4.2 Ethos, Pathos, dan Logos dalam Retorika Soekarno

Konsistensi pemikiran anti-imperialisme Soekarno tercermin dalam retorikanya. Maarif (2016:20) menegaskan bahwa kemampuan berbicara dan menulis secara sistematis berakar pada proses berpikir yang tertib.

Aristoteles menjelaskan bahwa persuasi dapat dibangun melalui karakter pembicara, emosi pendengar, dan kekuatan perkataan. Ketiga unsur tersebut dikenal sebagai ethos, pathos, dan logos (Maarif, 2016:18).

Sebagai pembicara, Soekarno membangun kredibilitas melalui konsistensinya menentang penjajahan dan imperialisme. Kredibilitas tersebut memperkuat penerimaan audiens serta mendukung terbentuknya solidaritas di antara pemimpin

negara-negara Asia dan Afrika. Selain ethos, penyampaian yang rasional, penggunaan fakta, dan kekuatan pilihan kata turut membangun daya persuasif retorikanya. Penyampaiannya yang secara rasional dan didukung data dan fakta membuat pendengar mendukung pernyataan Soekarno.

Mangunwijaya, sebagaimana dikutip Mahmud (1991:75), mencatat bahwa Soekarno memperoleh 26 gelar Doctor Honoris Causa dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri dengan latar sistem politik dan sosial yang berbeda. Penghargaan dari Vatikan berupa bintang jasa kepausan turut memperkuat kredibilitas internasionalnya.

Soekarno juga menunjukkan penguasaan paideia. Anderson, sebagaimana dikutip Maarif (2016:21), mendefinisikan paideia sebagai seni berpikir yang memadukan filsafat, poetika, dan retorika: filsafat berkaitan dengan pemikiran, poetika dengan sastra, dan retorika dengan wicara.

Manifestasi retorika berupa ucapan, meski kadang tulisan. Sebaliknya, poetika berwujud pada tulisan, meski kadang diucapkan. Yang jelas, retorika dan poetika berkaitan erat dengan ucapan dan/atau tulisan.

Simpati publik terhadap Soekarno tidak hanya dibentuk oleh penampilannya, tetapi terutama oleh gagasan dan penerimaan publik terhadap gagasan tersebut (Mangunwijaya dalam Mahmud, 1991:75).

Pengaruh Soekarno membantunya membangun solidaritas di antara pemimpin negara-negara tertindas untuk menghadapi kekuatan kapitalis-imperialis. Kepercayaan dirinya dalam komunikasi internasional berhubungan dengan persepsi kesetaraan Indonesia dengan negara-negara besar. Dalam kerangka ini, persepsi terhadap kekuatan pihak lain memengaruhi besarnya pengaruh pihak tersebut terhadap Indonesia.

4.3 Retorika Anti-Imperialisme dan Anti-Kapitalisme

Setelah Perang Dunia II, perubahan politik, ekonomi, dan sosial mendorong tuntutan kemerdekaan di berbagai wilayah jajahan. Negara-negara kolonialis kemudian membangun mekanisme ekonomi internasional yang tetap memungkinkan pengaruh terhadap negara-negara baru. Pertemuan Bretton Woods melahirkan sistem yang diikuti pembentukan IBRD, IMF, dan GATT sebagai infrastruktur ekonomi internasional.

Pemikiran Soekarno mengenai bentuk baru imperialisme dan kapitalisme telah tampak dalam Mencapai Indonesia Merdeka pada 1933. Ia menegaskan bahwa cita-cita perjuangan bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga masyarakat yang bebas dari sistem imperialisme dan kapitalisme (Supeni, 1991:154).

Kemerdekaan dipandang sebagai jembatan menuju tatanan yang lebih adil. Pemikiran tersebut berlanjut dalam konsepsi New Emerging Forces versus Old Established Forces dan pidato To Build the World Anew pada Sidang Umum PBB 1960.

Dalam Konferensi Islam Asia-Afrika, Soekarno membangkitkan kesadaran untuk membangun persatuan menghadapi hegemoni negara-negara imperialis-kapitalis. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, ia memandang kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme sebagai bagian dari ketidakadilan politik dunia.

Dalam amanat Konferensi Islam Asia-Afrika 1965, Soekarno menempatkan dunia Islam sebagai salah satu kekuatan politik internasional yang bangkit menentang imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme.

Ia menyerukan penghapusan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme sebagai syarat bagi kebangkitan kembali kehidupan umat Islam.

Melalui retorika ajakan, Soekarno membangun penghormatan terhadap gagasan persatuan bangsa-bangsa terjajah dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Konferensi Islam Asia-Afrika memberikan penghargaan tertulis kepada Soekarno sebagai Pahlawan Islam dan Kemerdekaan.

Upaya menyatukan umat Islam dengan kekuatan New Emerging Forces untuk menentang imperialisme, kapitalisme, dan neokolonialisme kembali ditegaskan dalam pidato penutupan Konferensi Islam Asia-Afrika pada 14 Maret 1965.

4.4 Karakter Komunikasi Internasional Soekarno

Berdasarkan kriteria Suryanto (2015:571), komunikasi internasional Soekarno dapat diuraikan melalui tiga unsur berikut:

1. Isu yang disampaikan bersifat global. Soekarno menggambarkan ketidakadilan sistem internasional yang dikuasai imperialisme dan kapitalisme, kemudian menyerukan solidaritas negara-negara Asia-Afrika untuk menghadapinya.
2. Komunikator dan komunikan berbeda kebangsaan. Melalui diplomasi tingkat tinggi, Soekarno bertindak sebagai komunikator yang melakukan diplomasi, negosiasi, dan lobi kepada masyarakat internasional serta para pemimpin Asia-Afrika.
3. Saluran yang digunakan bersifat internasional, meliputi media massa dan forum internasional seperti Sidang Umum PBB, Konferensi Asia-Afrika, KTT Nonblok, dan Konferensi Islam Asia-Afrika.

5. Kesimpulan

Soekarno memahami perjuangan bangsa terjajah tidak hanya sebagai perlawanan terhadap negara penjajah, tetapi juga terhadap sistem internasional yang dibentuk oleh imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Kredibilitas, kemampuan

membangkitkan emosi audiens, dan kekuatan kata-kata menjadi unsur penting dalam retorikanya untuk menyuarakan pembebasan bangsa-bangsa terjajah.

Kemampuan Soekarno menggalang solidaritas negara-negara Asia-Afrika dan kekuatan negara-negara Islam menunjukkan peran utama retorika dalam komunikasi internasionalnya. Kemampuan menulis, berbicara, dan mengekspresikan gagasan secara efektif membantu audiens dari latar budaya yang berbeda memahami pesan yang disampaikan.

Daftar Pustaka

- Anderson, Jan dan Mats Furberg. 1973. *Politik och Propaganda: Om Rostvarvandets Semantik*. Stockholm: Aldus Bonniers.
- Djumala, Darmansjah. 2004. *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Juwono, dkk. 1996. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2011. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- May, Teuku Rudy. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- May, Teuku Rudy. 2012. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca-Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- McClelland, Charles A. 1996. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Midgaard, Knut, Halvor Stenstadvald, dan Arild Underdal. 1973. *An Approach to Political Interlocutions*. *Scandinavian Political Studies*, 98-105.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Praeger, Frederick. 1965. *An Outline Study of International Political Communication*. New York-Washington-London.
- Rachmadi, F. 1998. *Informasi dan Komunikasi dalam Percaturan Internasional*. Bandung: Alumni.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roy, S. L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romarheim, Anders G. 2005. *Definitions of Strategic Political Communication*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs.
- Rumintang, Luciana. 2008. *Bekerja sebagai Diplomat*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Sarsito, Totok. 1993. *Teori Realisme Politik Internasional Hans J. Morgenthau: Suatu Analisis dan Kritik*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Shoelhi, Mohammad. 2011. *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Soekarno. *Percaya pada Benarnya Nasakom: Amanat Indoktrinasi Presiden Soekarno pada Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom*.
- Supeni. *Bung Karno dalam Pergulatan Pemikiran. Pengantar Mahmud Junaedi*. Pustaka Simponi.
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Williams, Hywel. 2009. *In Our Time: Pidato-Pidato yang Membentuk Dunia Modern*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

